

Rasionalitas Politik Kaum Muda Di Era Bonus Demografi: Analisis Pemikiran Hannah Arent

Teodorus Tio^{1*};

¹Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang

Email: teoaza3034@gmail.com

Abstrak

*Era bonus demografi menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Dominasi populasi muda menuntut adanya kualitas rasionalitas politik yang tidak sekadar bersifat pragmatis, tetapi juga berorientasi pada tindakan publik yang bermakna. Fenomena apatisisme politik, polarisasi digital, dan lemahnya budaya dialogis menunjukkan bahwa partisipasi politik kaum muda belum sepenuhnya sejalan dengan praktik demokrasi deliberatif. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana konsep tindakan (action) dan ranah publik (public realm) dari Hannah Arendt dapat berkontribusi dalam membentuk rasionalitas politik kaum muda di tengah situasi bonus demografi? Tulisan ini berangkat dari tesis bahwa rasionalitas politik yang sejati lahir dari keberanian untuk bertindak (action) secara bebas dan komunikatif dalam ruang publik, di mana manusia menyingkapkan identitasnya sebagai makhluk politik. Dengan menggunakan filsafat politik Arendt—khususnya konsep *vita activa*, *action*, dan *public realm*—penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kaum muda dapat mentransformasikan ruang digital menjadi arena partisipasi politik yang reflektif dan dialogis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan politik dan pembentukan budaya demokrasi yang lebih partisipatif di Indonesia.*

Keywords : Bonus Demografi; Rasionalitas Politik; Hannah Arendt; Action; Ruang Publik ;

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia memasuki fase penting dalam sejarah kependudukannya yang dikenal sebagai bonus demografi, yakni kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), puncak bonus demografi Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 2030-an, ketika generasi muda akan menjadi kekuatan sosial, ekonomi, dan

politik yang dominan dalam kehidupan berbangsa.¹ Situasi ini menghadirkan peluang emas bagi kemajuan nasional, namun juga memunculkan tantangan baru dalam kehidupan politik demokratis. Di tengah meningkatnya peran kaum muda, muncul pertanyaan mendasar: apakah bonus demografi ini benar-benar akan melahirkan bonus demokrasi, atau justru menimbulkan stagnasi partisipasi politik akibat lemahnya rasionalitas politik generasi muda?

Rasionalitas politik merupakan kemampuan individu untuk menimbang, menilai, dan mengambil keputusan politik berdasarkan pertimbangan logis, etis, dan komunikatif. Dalam konteks demokrasi, rasionalitas ini tidak sekadar berarti kemampuan memilih secara bebas, tetapi juga kemampuan berpartisipasi secara reflektif dan bertanggung jawab di ruang publik. Fenomena yang terjadi di Indonesia justru menunjukkan paradoks: di satu sisi, generasi muda menjadi aktor dominan dalam ruang digital yang sangat politis; namun di sisi lain, partisipasi mereka sering kali bersifat impulsif, reaktif, dan terpolarisasi oleh kepentingan partisan. Kondisi ini menandakan adanya krisis dalam cara kaum muda memahami makna politik itu sendiri. Sejalan dengan pendapat Habermas, demokrasi yang sehat menuntut adanya *rational discourse* yang berakar pada komunikasi timbal balik, bukan sekadar ekspresi spontan tanpa refleksi.²

Dalam konteks ini, pemikiran Hannah Arendt menjadi sangat relevan. Dalam karyanya *The Human Condition* (1958), Arendt membedakan tiga bentuk aktivitas manusia: *labor*, *work*, dan *action*. Dari ketiganya, *action* menempati posisi tertinggi karena di dalamnya manusia menampilkan dirinya kepada orang lain melalui tindakan dan ucapan di ruang publik. Arendt menegaskan bahwa politik sejati bukanlah persoalan kekuasaan, melainkan persoalan “menjadi hadir” (*appearance*) bersama orang lain dalam kebebasan dan pluralitas.³ Dengan demikian, politik adalah ruang tempat manusia menyingkapkan identitasnya melalui komunikasi dan tindakan, bukan sekadar arena perebutan kepentingan. Pemikiran ini dapat menjadi kerangka konseptual penting untuk membaca kembali peran kaum muda dalam membangun demokrasi di era bonus demografi.

Namun, situasi politik kontemporer memperlihatkan kecenderungan bahwa ruang publik kini bergeser ke ranah digital. Ruang digital ini di satu sisi membuka peluang baru bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam diskursus politik; tetapi di sisi lain, ia juga mudah terperangkap dalam logika algoritmik, populisme, dan disinformasi. Arendt tidak hidup di era media sosial, namun gagasannya tentang *public realm* dan *action* memberikan perspektif kritis: ruang publik

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2045: Hasil Sensus Penduduk 2020* (Jakarta: BPS, 2023), 45.

² Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, Vol. 1 (Boston: Beacon Press, 1984), 86.

³ Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1958), 176.

yang sehat menuntut adanya komunikasi yang rasional dan penghargaan terhadap pluralitas. Ketika ruang publik kehilangan kualitas dialogisnya, maka tindakan politik (*action*) terdegradasi menjadi reaksi massa tanpa refleksi. Di sinilah tantangan utama bonus demografi: apakah kaum muda Indonesia mampu menghidupkan kembali makna politik sebagai *tindakan bersama yang bermakna*?

Kajian mengenai keterlibatan politik kaum muda dan relevansinya bagi demokrasi di era bonus demografi telah menarik perhatian banyak peneliti, baik dari perspektif politik, sosiologis, maupun filosofis. Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti hubungan antara demokrasi, partisipasi politik kaum muda, dan perkembangan era digital di Indonesia. Yazied Taqiyuddin Ahmad dan Lugina Setyawati (2022) meneliti fenomena aktivisme digital melalui kampanye “No Viral No Action” dan menemukan bahwa media sosial telah menjadi sarana baru bagi kaum muda untuk mengekspresikan sikap politik dan membangun solidaritas publik secara virtual, namun sering kali terjebak pada logika viralitas yang dangkal.⁴ Reza Fauzi dkk. (2024) menunjukkan bahwa generasi milenial Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, tetapi masih cenderung bersikap pragmatis dalam menentukan pilihan politik, sehingga partisipasi mereka belum sepenuhnya mencerminkan rasionalitas deliberatif.⁵ Bernardus Herdian Nugroho (2023) dalam studinya tentang gerakan Reformasi Dikorupsi dan Tolak Omnibus Law menemukan bahwa media sosial berperan ganda: sebagai alat mobilisasi demokratis sekaligus ruang reproduksi polarisasi wacana politik.⁶ Waluyo Handoko dkk. (2023) menekankan pentingnya pendidikan politik dan literasi digital untuk membentuk pemilih muda yang berpikir kritis dan bertanggung jawab di tengah banjir informasi digital.⁷ Sementara itu, Ade Candra dkk. (2023) membahas bagaimana media sosial membentuk identitas politik generasi muda yang lebih cair, personal, dan performatif.⁸ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menyinggung secara mendalam aspek rasionalitas politik kaum muda dalam terang pemikiran Hannah Arendt tentang *action* dan ruang publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemikiran Hannah Arendt tentang *action* dan ruang publik dapat digunakan untuk memahami serta memperkaya rasionalitas politik kaum muda di era bonus demografi Indonesia. Keunikan kajian ini terletak pada upaya menghubungkan teori filsafat politik klasik-modern

⁴ Yazied Taqiyuddin Ahmad dan Lugina Setyawati, “Aktivisme Digital Kaum Muda: Studi Kasus Kampanye ‘No Viral No Action’ di Era Media Sosial,” dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 31, no. 2 (2022): 15.

⁵ Reza Fauzi et al., “Perilaku Digital Generasi Milenial dalam Meningkatkan Literasi Politik di Indonesia,” *Khizanah al-Hikmah: dalam Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 12, no. 1 (2024), 49. <https://doi.org/10.24252/kah.v12i1a5>

⁶ Bernardus Herdian Nugroho, “Media Sosial, Gerakan Politik, dan Polarisasi Wacana Publik di Indonesia,” *Political Science and Sociology Journal* 2, no. 3 (2023): 91. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603>

⁷ Waluyo Handoko et al., “Literasi Digital dan Rasionalitas Pemilih Muda di Era Demokrasi Digital,” *LOGOS: Jurnal Filsafat dan Teologi* 21, no. 1 (2023): 19. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.23229>

⁸ Ade Candra et al., “Media Sosial dan Pembentukan Identitas Politik Generasi Muda Indonesia,” *Kybernology: Jurnal Studi Pemerintahan dan Politik Digital* 5, no. 2 (2023): 111. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v3i2.13054>

dengan realitas sosial-politik kontemporer di Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti bonus demografi dari aspek ekonomi atau kependudukan, tulisan ini memusatkan perhatian pada aspek filsafat politik dan etika publik kaum muda. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan refleksi teoretis, tetapi juga tawaran konseptual bagi pembentukan budaya demokrasi yang rasional, komunikatif, dan partisipatoris.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Menurut N. W. Palupi,dkk (2025) metode kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada proses analisis dan interpretasi terhadap data berupa teks, gagasan, dan fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.⁹ Metode ini dipilih karena berfokus pada analisis konseptual dan reflektif terhadap gagasan-gagasan filosofis dan politik yang bersumber dari literatur primer dan sekunder. Data utama diperoleh dari karya-karya Hannah Arendt seperti *The Human Condition*, *Between Past and Future*, dan *The Life of the Mind* yang menjadi dasar untuk memahami konsep *action* dan *ruang publik*, serta dari berbagai literatur pendukung seperti tulisan Seyla Benhabib dan Dana R. Villa yang mengulas relevansi pemikiran Arendt dalam konteks politik kontemporer. Selain itu, kajian empiris dan laporan penelitian mengenai partisipasi politik kaum muda serta dinamika demokrasi digital di Indonesia turut digunakan untuk memperkaya konteks penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-reflektif dan interpretatif guna menelusuri bagaimana pemikiran Arendt tentang tindakan dan ruang publik dapat menjadi dasar pembentukan rasionalitas politik kaum muda di era bonus demografi, serta memberikan kontribusi bagi penguatan etika publik dan budaya demokrasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kondisi Bonus Demografi dan Tantangan Demokrasi Indonesia

Bonus demografi merupakan situasi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia saat ini memiliki sekitar 191 juta penduduk usia produktif dari total 277 juta jiwa, dengan rasio ketergantungan yang menurun hingga di bawah 50 persen pada tahun 2023.¹⁰ Kondisi ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada periode 2030–2040 menjadikan Indonesia salah satu negara dengan potensi tenaga kerja muda terbesar di Asia Tenggara. Secara

⁹ N. W. I. Palupi, S. R. Ummah, dan P. Larasati, “Konsep dan Praktik Metode Kualitatif untuk Penelitian Sosial,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 188.

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2045: Hasil Sensus Penduduk 2020* (Jakarta: BPS, 2023), 45.

teoritis, situasi ini merupakan momentum emas untuk meningkatkan produktivitas nasional dan memperkuat kapasitas demokrasi melalui partisipasi warga negara yang lebih luas. Namun, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal kesadaran politik, pendidikan kewarganegaraan, dan etika publik.

Meskipun potensi demografis Indonesia sangat besar, realitas politik menunjukkan adanya paradoks. Tingkat partisipasi politik kaum muda dalam pemilu memang mengalami peningkatan secara kuantitatif, namun secara kualitatif partisipasi tersebut sering kali tidak diiringi oleh kedalaman rasionalitas politik. Generasi muda cenderung aktif dalam wacana politik di media sosial, tetapi aktivitas itu lebih sering bersifat emosional dan reaktif daripada reflektif. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran karakter demokrasi dari demokrasi deliberatif yang mengandalkan diskursus rasional dan kesetaraan partisipasi ke arah demokrasi ekspresif, di mana ekspresi dan popularitas menggantikan argumentasi dan penalaran publik.¹¹

Salah satu tantangan besar dalam konteks ini adalah meningkatnya apatisme politik di kalangan generasi muda. Banyak anak muda yang menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, elitis, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir 47% responden usia 17–30 tahun menyatakan tidak tertarik mengikuti isu politik nasional secara aktif.¹² Apatisme ini dapat dimaknai sebagai krisis kepercayaan terhadap institusi politik dan ketidakmampuan sistem demokrasi menghadirkan ruang partisipasi yang bermakna. Dalam pandangan Hannah Arendt, kondisi ini menandakan hilangnya *public realm* ruang di mana manusia dapat menampakkan diri dan terlibat dalam tindakan bersama (*action*) yang memberi makna politis bagi keberadaannya.

Selain apatisme, fenomena politik identitas menjadi ancaman serius bagi rasionalitas demokrasi di era bonus demografi. Politik identitas sering kali mengeksploitasi perbedaan etnis, agama, dan ideologi sebagai alat mobilisasi dukungan, terutama di ruang digital yang algoritmik. Pola ini melahirkan segregasi wacana publik yang tajam dan mengikis semangat kebersamaan. Arendt dalam *The Origins of Totalitarianism* mengingatkan bahwa ketika politik kehilangan ruang dialog dan digantikan oleh logika kelompok homogen, maka totalitarianisme dapat tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri.¹³ Dalam konteks Indonesia, politik identitas bukan hanya melemahkan kualitas demokrasi, tetapi juga menghambat kaum muda untuk membangun rasionalitas politik yang berlandaskan pluralitas dan kebebasan.

¹¹ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996), 305.

¹² Lembaga Survei Indonesia (LSI), *Persepsi Politik Generasi Muda terhadap Pemilu 2024* (Jakarta: LSI Press, 2024)

¹³ Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York: Harcourt, 1951), 474.

Tantangan lain yang tak kalah besar adalah polarisasi digital. Di era media sosial, ruang publik yang seharusnya menjadi arena diskusi rasional berubah menjadi “ruang gema” (*echo chamber*) yang memperkuat bias dan disinformasi. Generasi muda yang lahir dan tumbuh di tengah digitalisasi cenderung menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi politik. Namun, tanpa literasi digital yang kuat, mereka mudah terjebak dalam narasi manipulatif dan propaganda. Kondisi ini membuat partisipasi politik menjadi rapuh dan emosional, jauh dari idealitas *action* Arendt yang menuntut kesadaran reflektif dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, pemanfaatan bonus demografi harus diiringi dengan pembentukan kebudayaan politik baru yang berbasis rasionalitas komunikatif, pluralitas, dan kebebasan bertindak dalam ruang publik yang sehat.

Rasionalitas Politik Kaum Muda: Dari Ketidakterlibatan Menuju Tindakan

Dalam konteks bonus demografi, kaum muda Indonesia seharusnya menjadi subjek utama yang menentukan arah perjalanan demokrasi. Namun, dalam praktiknya, banyak dari mereka terjebak dalam sikap apatis dan ketidakterlibatan politik yang semakin meningkat. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis rasionalitas politik, yakni ketidakmampuan kaum muda untuk menilai dan bertindak berdasarkan refleksi rasional dalam ruang publik. Rasionalitas politik yang seharusnya bersifat dialogis dan partisipatif kini sering kali digantikan oleh pola pikir pragmatis dan konsumtif, yang lebih berorientasi pada keuntungan pribadi ketimbang kepentingan bersama. Dalam konteks ini, demokrasi kehilangan roh deliberatifnya karena ruang publik yang seharusnya menjadi tempat bertemunya gagasan dan tindakan justru direduksi menjadi arena pencitraan semu.¹⁴

Hannah Arendt, melalui karyanya *The Human Condition* yang memandang tindakan (*action*) sebagai wujud tertinggi dari aktivitas manusia yang memungkinkan kebebasan dan pluralitas hadir dalam dunia bersama (*common world*).¹⁵ Tindakan bagi Arendt bukan sekadar perilaku politik yang instrumental, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam membangun realitas bersama melalui dialog dan tanggung jawab moral. Dalam kerangka ini, krisis rasionalitas politik di kalangan muda dapat dilihat sebagai krisis ruang publik, di mana manusia tidak lagi hadir sebagai (*zoon politikon*) makhluk yang berpolitik secara aktif melainkan sebagai konsumen informasi yang terjebak dalam algoritma digital dan logika pasar politik.¹⁶

¹⁴ Yasraf A. Piliang, *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika* (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), 88.

¹⁵ Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1958), 175.

¹⁶ Ibid., 198.

Hambatan terhadap rasionalitas politik kaum muda tidak hanya bersumber dari kurangnya pendidikan politik, tetapi juga dari cara sistem digital membentuk persepsi dan keputusan mereka. Media sosial, yang semula dianggap memperluas partisipasi politik, kini justru mempersempitnya melalui algoritma yang menciptakan ruang gema (*echo chamber*), di mana individu hanya mendengar suara yang memperkuat pandangannya sendiri.¹⁷ Akibatnya, diskursus politik kehilangan daya reflektif dan berubah menjadi ajang afirmasi identitas serta polarisasi emosional. Dalam situasi ini, tindakan politik yang lahir bukan lagi tindakan yang reflektif dan deliberatif, melainkan respons reaktif terhadap tekanan sosial dan narasi populis.

Selain itu, muncul pula bentuk “hedonisme politik” yang membuat kaum muda lebih tertarik pada performa simbolik ketimbang perjuangan substansial. Keterlibatan politik dipahami sebagai gaya hidup, bukan tanggung jawab etis terhadap ruang publik.¹⁸ Dalam bingkai pemikiran Arendt, fenomena ini mencerminkan lenyapnya (*vita activa*) kehidupan aktif manusia yang menghubungkan kerja, karya, dan tindakan karena dominasi (*animal laborans*) manusia yang hidup hanya untuk kebutuhan dan kenyamanan dirinya sendiri.¹⁹ Dengan demikian, politik kehilangan dimensi transformatifnya, dan rasionalitas berubah menjadi sarana membenaran bagi kepentingan pragmatis.

Dalam menghadapi situasi tersebut, perlu dibangun kembali rasionalitas politik yang bersumber dari kesadaran akan keberadaan bersama dan tanggung jawab kolektif. Kaum muda perlu didorong untuk menghidupkan ruang publik yang otentik melalui dialog, solidaritas, dan tindakan nyata demi kebaikan bersama. Rasionalitas semacam ini tidak menolak teknologi digital, tetapi menggunakannya sebagai sarana untuk memperluas partisipasi reflektif, bukan memperkuat isolasi sosial. Di sinilah relevansi pemikiran Arendt menjadi signifikan, karena ia menawarkan jalan untuk memahami politik bukan sekadar sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai ruang etis di mana manusia mewujudkan kebebasannya bersama orang lain.²⁰

Menafsirkan Kembali *Action* dan Ruang Publik Arendtian di Era Bonus Demografi

Dalam pandangan Hannah Arendt, tindakan (*action*) merupakan inti dari kehidupan politik, karena melalui tindakan manusia menyingkapkan identitas dan kebebasannya di hadapan orang lain.²¹ Tindakan tidak lahir dalam kesendirian, melainkan dalam *ruang publik* yakni suatu

¹⁷ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: Public Affairs, 2019), 212.

¹⁸ Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity* (Cambridge: Polity Press, 2000), 33.

¹⁹ Hannah Arendt, *The Human Condition*, 320.

²⁰ Seyla Benhabib, *The Reluctant Modernism of Hannah Arendt* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2003), 115.

²¹ Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1958), 175.

arena di mana pluralitas manusia dapat berinteraksi dan mengafirmasi eksistensi satu sama lain. Dalam konteks era bonus demografi, ketika populasi muda Indonesia mendominasi, gagasan Arendt tentang *action* dan ruang publik menjadi sangat relevan. Kaum muda dengan semangat, kreativitas, dan kapasitas digitalnya, berpotensi menjadi agen perubahan yang memperluas ruang politik ke dalam bentuk-bentuk baru partisipasi publik. Namun, potensi ini akan kehilangan maknanya apabila tindakan mereka tidak berakar pada kesadaran reflektif dan tanggung jawab moral terhadap sesama.²²

Media sosial sebagai ruang komunikasi yang dominan di kalangan muda, dapat dipandang sebagai bentuk “ruang publik baru”.²³ Di dalamnya, gagasan, opini, dan perdebatan publik muncul dengan cepat dan meluas, menciptakan peluang bagi demokratisasi wacana dan ekspresi kebebasan. Akan tetapi, ruang publik digital juga memiliki ambivalensi yang serius. Algoritma media sosial cenderung membentuk ruang publik semu, di mana interaksi politik lebih sering didorong oleh logika viralitas daripada rasionalitas dialogis. Dalam konteks ini, tindakan politik kehilangan dimensi reflektifnya dan bergeser menjadi performatif. Artinya, sebuah tontonan yang lebih menekankan citra dibandingkan isi.²⁴

Arendt mengingatkan bahwa politik sejati bukan sekadar aktivitas instrumental untuk mencapai tujuan, melainkan pertemuan antarmanusia yang membentuk dunia bersama (*common world*).²⁵ Maka, tantangan bagi kaum muda Indonesia di era bonus demografi adalah bagaimana menafsirkan ulang tindakan politik mereka di tengah arus digitalisasi, agar tidak terjebak dalam simulasi ruang publik yang dangkal. Ruang digital perlu dipahami bukan sekadar sebagai tempat ekspresi, tetapi sebagai arena etis untuk menghidupkan kembali rasionalitas komunikatif dan solidaritas sosial. Dengan demikian, tindakan politik digital dapat menjadi sarana *appearance* dalam arti Arendtian yakni kehadiran nyata manusia di hadapan yang lain, bukan sekadar eksistensi virtual yang terputus dari dunia bersama.²⁶

Reinterpretasi atas *vita activa* dalam konteks digital menjadi penting. Arendt membedakan antara tiga dimensi aktivitas manusia: *labor* (kerja untuk bertahan hidup), *work*

²² Dana R. Villa, *Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah Arendt* (Princeton: Princeton University Press, 1999), 44.

²³ C. I. Ukarana, M. Suharbillah, dan P. K. Nisa, “Respons terhadap Komunitas AnieSpace sebagai Bentuk Ruang Publik Baru,” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2024): 165.

²⁴ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: Public Affairs, 2019), 247.

²⁵ Hannah Arendt, *Between Past and Future* (New York: Penguin, 2006), 221.

²⁶ D. Aenulguri dan R. Y. A. Hambali, “Tantangan Eksistensi Manusia di Era Inovasi *Metaverse* melalui Eksistensialisme Martin Heidegger,” dalam *Gunung Djati Conference Series*, vol. 19 (April 2023): 505–516.

(penciptaan dunia buatan), dan *action* (tindakan politik yang menciptakan kebersamaan).²⁷ Dalam masyarakat digital, batas-batas antara ketiganya menjadi kabur: kerja dan tindakan sering kali direduksi menjadi aktivitas yang diukur oleh produktivitas dan keterkenalan. Oleh karena itu, tantangan utama bagi kaum muda adalah mengembalikan *action* sebagai bentuk praksis yang otonom dan bermakna. Sebuah tindakan yang bukan ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh kesadaran etis dan tanggung jawab terhadap dunia.²⁸

Dengan demikian, menafsirkan kembali *action* dan ruang publik dalam semangat Arendt berarti membangun kembali politik sebagai ruang kemunculan (*space of appearance*) yang otentik. Di sinilah rasionalitas politik kaum muda menemukan tempatnya: bukan dalam kalkulasi strategis atau pencitraan digital, melainkan dalam keberanian untuk bertindak bersama, berdialog, dan memperjuangkan kebenaran di tengah pluralitas masyarakat. Dalam konteks bonus demografi, hal ini menjadi krusial karena masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana generasi muda menata ulang relasi antara kebebasan, tindakan, dan tanggung jawab di era digital.²⁹

Membangun Ruang Publik Digital yang Emansipatif

Ruang publik digital kini menjadi medan utama bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri, berdiskusi politik, dan membangun identitas kolektif.³⁰ Dalam ruang ini, batas antara dunia privat dan publik semakin kabur, memberi kesempatan bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam wacana sosial-politik tanpa harus berada di arena politik formal. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi ruang kontestasi ide, tempat di mana kaum muda tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen narasi politik dan sosial. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran dari bentuk partisipasi politik konvensional menuju praktik digital yang lebih cair dan spontan, di mana opini dan solidaritas dapat terbentuk dengan cepat melalui jaringan daring yang luas.

Kaum muda memakai media sosial sebagai panggung untuk melawan ketidakadilan sosial melalui kampanye digital seperti penolakan terhadap RUU Omnibus Law, advokasi penghapusan kekerasan seksual, dan isu lingkungan.³¹ Aktivisme digital tersebut memperlihatkan bentuk repertoar gerakan sosial baru yang semakin matang dalam membangun kesadaran publik. Demikian pula, aktivisme digital bukan sekadar praktik ekspresi, melainkan juga bentuk edukasi publik yang memperkuat kewargaan digital berbasis kesadaran hak dan

²⁷ Arendt, *The Human Condition*, 79.

²⁸ Zygmunt Bauman, *Liquid Life* (Cambridge: Polity Press, 2005), 110.

²⁹ R. M. W. Hidayah, E. S. Abidin, I. Arifin, dan M. R. S. Ahmad, "Membangun Kesadaran Politik: Pentingnya Partisipasi Generasi Muda di Era Digital," *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2024): 74–77.

³⁰ A. Jamil, F. N. Ranga, R. D. Rendra, dan T. Ahmad, "Media Sosial Sebagai Sarana Pembentukan Identitas Politik Pemuda," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 3 (2025), 244.

³¹ Nora Titahning Ayudha, "Repertoar Aktivisme Digital di Indonesia," *OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal*, vol. 1, no. 2 (2024), 165.

tanggung jawab sosial. Dengan demikian, ruang publik digital bukan hanya menjadi arena komunikasi, tetapi juga wadah pembentukan karakter politik generasi muda yang reflektif, kritis, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Ruang publik digital juga menghadirkan tantangan serius terhadap cita-cita emansipatif yang diharapkan tumbuh dari partisipasi kaum muda.³² Fenomena *filter bubble* dan *echo chamber* menjadi ancaman nyata bagi kebebasan berpikir dan keterbukaan dialog. Dalam ruang digital yang dikendalikan algoritma, pengguna cenderung hanya terpapar pada informasi dan pandangan yang sesuai dengan preferensi mereka, menciptakan ruang gema yang mempersempit horizon berpikir dan memperkuat bias konfirmasi. Situasi ini menyebabkan diskusi publik kehilangan sifat deliberatifnya, karena perbedaan pendapat tidak lagi dipandang sebagai peluang untuk belajar, melainkan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok. Dalam konteks politik digital, hal ini menjadikan ruang publik semakin terfragmentasi dan sulit diakses oleh narasi alternatif.

Algoritma media sosial membuat kaum muda cenderung berinteraksi hanya dengan pengguna yang berpandangan serupa, sehingga kemampuan berpikir kritis dan pluralitas ide semakin melemah.³³ Risiko polarisasi digital terhadap stabilitas sosial-politik bangsa, di mana polarisasi yang diperkuat algoritma berpotensi menurunkan kualitas demokrasi deliberatif di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa logika algoritma telah mulai menggantikan logika rasionalitas publik, di mana wacana politik lebih ditentukan oleh *viralitas* dan emosi ketimbang argumentasi yang rasional. Dengan demikian, perlu upaya sadar untuk mengembangkan literasi digital dan etika publik agar ruang digital dapat kembali menjadi arena dialog yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Agar ruang digital dapat berfungsi sebagai ruang publik yang emansipatif, diperlukan literasi digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan reflektif. Program literasi digital yang menekankan kemampuan menilai informasi secara kritis, berpikir etis, dan berdialog secara deliberatif menjadi penting bagi generasi muda. Penelitian oleh Khairuddin (2022) menunjukkan bahwa partisipasi politik anak muda akan lebih bermakna jika ditopang oleh modal sosial yang kuat dan kapasitas reflektif terhadap isu-isu publik.³⁴ Oleh karena itu, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemerintah perlu menciptakan ekosistem pendidikan politik yang mengintegrasikan dimensi digital dan etika publik secara seimbang.

Selain itu, pemaknaan kembali konsep *vita activa* Hannah Arendt menjadi relevan untuk mengembangkan tindakan politik yang otentik di ruang digital. Dalam konteks Arendtian, *action* berarti kehadiran aktif manusia dalam dunia bersama melalui dialog dan kebebasan. Ketika diterapkan dalam konteks digital, *action* menuntut transparansi algoritma, tanggung jawab moral

³² A. Baskoro dan D. Oskardo, "Demokrasi Digital di Tangan Pemuda: Kepercayaan, Optimisme dan Aksesibilitas Kepemimpinan Muda di Indonesia," *Jurnal Pemuda Indonesia*, vol. 1, no. 1 (2024), 2.

³³ Sri Dwi Fajarini, F. Yuliani, dan J. Kurniawati, "Peran Algoritma Media Sosial dalam Membentuk Filter Bubble dan Echo Chamber di Kalangan Milenial dan Gen Z Kota Bengkulu," *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)*, vol. 6, no. 1 (2025), 205.

³⁴ Khairuddin, "Partisipasi Politik Anak Muda: Kajian Sosiologis terhadap Aktivisme Digital," *NUSANTARA: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 1 (2022), 32.

pengguna, dan keberanian untuk tampil secara autentik dalam diskursus publik. Siti Fatimah menekankan bahwa regulasi ruang digital di Indonesia perlu bergerak ke arah yang lebih partisipatif, bukan sekadar membatasi, agar hak-hak konstitusional warga tetap terjamin di tengah transformasi teknologi.³⁵

Implikasi bagi Demokrasi Indonesia

Pemikiran Hannah Arendt mengenai *action* dan ruang publik membuka cakrawala baru untuk memahami tantangan demokrasi Indonesia di tengah era bonus demografi. Demokrasi tidak dapat bertahan hanya melalui prosedur elektoral, tetapi membutuhkan budaya politik yang berbasis pada partisipasi reflektif, tanggung jawab moral, dan dialog antarwarga.³⁶ Dalam kerangka ini, kaum muda sebagai aktor demografis utama memegang peranan strategis dalam menghidupkan kembali rasionalitas politik yang sejati yakni politik yang berakar pada *logos*, pada kemampuan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak bersama demi kebaikan bersama (*bonum commune*). Oleh karena itu, revitalisasi demokrasi Indonesia harus diarahkan pada pembentukan kesadaran politik kaum muda yang tidak hanya cerdas secara teknologis, tetapi juga berkarakter etis dan deliberatif.

Pendidikan politik menjadi titik awal yang sangat menentukan dalam proses tersebut. Pendidikan politik bukan sekadar pengajaran tentang sistem pemerintahan atau hak pilih, tetapi pembentukan kemampuan reflektif untuk memahami arti kehadiran bersama di ruang publik.³⁷ Dalam semangat Arendtian, pendidikan politik harus mengembalikan politik sebagai pengalaman bersama yang menumbuhkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap dunia. Melalui pendidikan politik yang berorientasi pada etika publik, kaum muda dapat belajar bahwa tindakan politik sejati tidak diukur dari seberapa besar pengaruhnya di media sosial, melainkan dari sejauh mana tindakan itu mampu memperluas ruang kebersamaan dan memperdalam keadaban publik.³⁸

Selain itu, penguatan literasi digital menjadi bagian penting dari upaya membangun rasionalitas politik yang kritis.³⁹ Literasi digital yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan kritis dalam memilah informasi, menilai sumber, serta memahami dampak etis dari komunikasi

³⁵ Siti Fatimah, "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru," *Cakrawala*, vol. 19, no. 1 (2024), 67.

³⁶ Hannah Arendt, *Between Past and Future* (New York: Penguin, 2006), 220.

³⁷ A. Prayugo dan R. B. P. Prayitno, "Pendidikan Politik sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 3, no. 3 (2022): 428.

³⁸ E. Susilawati and H. Kurnia, "Etika dalam Pendidikan Politik (Menghadapi Bias dan Propaganda)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik* 2, no. 2 (2024): 94.

³⁹ N. Arifuddin dan N. Hermawan, "Pendidikan Literasi Politik dan Tantangan *Post-truth* dalam Ruang Publik Indonesia Pasca Pemilihan Umum 2024," *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 4 (2025): 248.

digital.⁶ Dalam konteks ini, Arendt mengingatkan bahwa kemampuan berpikir (*thinking*) adalah syarat bagi tindakan yang bermakna.⁷ Tanpa berpikir, manusia mudah terjebak dalam konformitas dan kehilangan otonomi moralnya. Oleh karena itu, membangun literasi digital berarti juga menanamkan kemampuan reflektif agar ruang publik digital tidak menjadi tempat reproduksi kebencian dan hoaks, melainkan wadah bagi dialog yang rasional dan konstruktif.

Oleh sebab itu, relevansi pemikiran Arendt bagi demokrasi Indonesia terletak pada ajakannya untuk memulihkan politik sebagai tindakan bermakna. Tindakan yang melampaui kalkulasi kekuasaan dan menegaskan martabat manusia sebagai makhluk yang berpikir dan bertindak di tengah dunia bersama. Dalam konteks bonus demografi, hal ini berarti membangun generasi muda yang tidak hanya aktif secara digital, tetapi juga reflektif secara moral dan dialogis secara sosial.⁴⁰ Kaum muda yang demikian bukan hanya penerus demokrasi, melainkan penafsir baru bagi makna kebebasan dan tanggung jawab di era modern.

PENUTUP

Bonus demografi akan menjadi sumber keuntungan yang nyata hanya jika generasi muda mampu menampilkan rasionalitas dan kemampuan komunikasi yang efektif dalam ruang publik. Inspirasi dari pemikiran Hannah Arendt menekankan pentingnya *action* sebagai bentuk nyata kebebasan dan tanggung jawab politik, sehingga setiap tindakan tidak sekadar bersifat simbolik atau reaktif, tetapi bermakna dalam membangun dunia bersama. Demokrasi sejati dalam perspektif ini, tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi atau kuantitas partisipasi, melainkan oleh kualitas kehadiran dan keberanian individu untuk bertindak secara etis dan deliberatif demi kepentingan bersama, memperkuat solidaritas, pluralitas, dan dialog di tengah masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber dari Buku

- [1] Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt, 1951.
- [2] —. *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
- [3] —. *Between Past and Future*. New York: Penguin, 2006.

⁴⁰ A. Rahmania, M. Zulfikar, dan M. Ma'arif, "Urgensi Literasi Digital dalam Penguatan Kapabilitas *Critical Thinking* terhadap Pemilih Pemula," *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2024): 14.

- [4] Badan Pusat Statistik (BPS). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2045: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS, 2023.
- [5] Bauman, Zygmunt. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press, 2000.
- [6] —. *Liquid Life*. Cambridge: Polity Press, 2005.
- [7] Benhabib, Seyla. *The Reluctant Modernism of Hannah Arendt*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003.
- [8] Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action*. Vol. 1. Boston: Beacon Press, 1984.
- [9] —. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996.
- [10] Lembaga Survei Indonesia (LSI). *Persepsi Politik Generasi Muda terhadap Pemilu 2024*. Jakarta: LSI Press, 2024.
- [11] Piliang, Yasraf A. *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra, 2017.
- [12] Villa, Dana R. *Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah Arendt*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- [13] Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: Public Affairs, 2019.

Sumber dari Jurnal atau Laporan Penelitian

- [1] Ahmad, A., M. Rahmania, M. Zulfikar, dan M. Ma'arif. "Urgensi Literasi Digital dalam Penguatan Kapabilitas *Critical Thinking* terhadap Pemilih Pemula." *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2024): 14–22.
- [2] Ahmad, Yazied Taqiyuddin, dan Lugina Setyawati. "Aktivisme Digital Kaum Muda: Studi Kasus Kampanye 'No Viral No Action' di Era Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 31, no. 2 (2022): 15–34. <https://doi.org/10.17509/jpis.v33i1>.
- [3] Aenulguri, D., dan R. Y. A. Hambali. "Tantangan Eksistensi Manusia di Era Inovasi Metaverse melalui Eksistensialisme Martin Heidegger." *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 505–516.

- [4] Arifuddin, N., dan N. Hermawan. “Pendidikan Literasi Politik dan Tantangan Post-truth dalam Ruang Publik Indonesia Pasca Pemilihan Umum 2024.” *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7, no. 4 (2025): 2489–2509.
- [5] Baskoro, A., dan D. Oskardo. “Demokrasi Digital di Tangan Pemuda: Kepercayaan, Optimisme dan Aksesibilitas Kepemimpinan Muda di Indonesia.” *Jurnal Pemuda Indonesia* 1, no. 1 (2024): 1–22.
- [6] Candra, Ade, dkk. “Media Sosial dan Pembentukan Identitas Politik Generasi Muda Indonesia.” *Kybernology: Jurnal Studi Pemerintahan dan Politik Digital* 5, no. 2 (2023): 111–128. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v3i2.13054>.
- [7] Fajarini, Sri Dwi, F. Yuliani, dan J. Kurniawati. “Peran Algoritma Media Sosial dalam Membentuk *Filter Bubble* dan *Echo Chamber* di Kalangan Milenial dan Gen Z Kota Bengkulu.” *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)* 6, no. 1 (2025): 205.
- [8] Fatimah, Siti. “Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru.” *Cakrawala* 19, no. 1 (2024): 67–86.
- [9] Fauzi, Reza, dkk. “Perilaku Digital Generasi Milenial dalam Meningkatkan Literasi Politik di Indonesia.” *Khazanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 12, no. 1 (2024): 49–61. <https://doi.org/10.24252/kah.v12i1a5>.
- [10] Handoko, Waluyo, dkk. “Literasi Digital dan Rasionalitas Pemilih Muda di Era Demokrasi Digital.” *LOGOS: Jurnal Filsafat dan Teologi* 21, no. 1 (2023): 19–34.
- [11] Hidayah, R. M. W., E. S. Abidin, I. Arifin, dan M. R. S. Ahmad. “Membangun Kesadaran Politik: Pentingnya Partisipasi Generasi Muda di Era Digital.” *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2024): 74–77.
- [12] Jamil, A., F. N. Rangga, R. D. Rendra, dan T. Ahmad. “Media Sosial Sebagai Sarana Pembentukan Identitas Politik Pemuda.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 244–253.
- [13] Khairuddin. “Partisipasi Politik Anak Muda: Kajian Sosiologis terhadap Aktivisme Digital.” *NUSANTARA: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2022): 22–32.
- [14] Nugroho, Bernardus Herdian. “Media Sosial, Gerakan Politik, dan Polarisasi Wacana Publik di Indonesia.” *Political Science and Sociology Journal* 2, no. 3 (2023): 19–34.
- [15] Palupi, N. W. I., S. R. Ummah, dan P. Larasati. “Konsep dan Praktik Metode Kualitatif untuk Penelitian Sosial.” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 188–198.

- [16] Prayugo, A., dan R. B. P. Prayitno. "Pendidikan Politik sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 3, no. 3 (2022): 427–442.
- [17] Susilawati, E., dan H. Kurnia. "Etika dalam Pendidikan Politik (Menghadapi Bias dan Propaganda)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik* 2, no. 2 (2024): 93–112.
- [18] Titahning Ayudha, Nora. "Repertoar Aktivisme Digital di Indonesia." *OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal* 1, no. 2 (2024): 165–171.
- [19] Ukarana, C. I., M. Suharbillah, dan P. K. Nisa. "Respons terhadap Komunitas AnieSpace sebagai Bentuk Ruang Publik Baru." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2024): 165–178.